



RENCANA KERJA TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 telah disusun. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 merupakan dokumen tahunan yang disusun dan merupakan wujud nyata dari pelaksanaan rencana pembangunan yang berbasis kinerja. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 ini.

Nunukan, 4 Juli 2024

Kepala Badan



Fitraeni, S.Sos

197311302001122002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan Sasaran	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	25
BAB V PENUTUP	33

Lampiran:

RENJA SIPD TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk Menyusun Renja Perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2024 didasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang rencana pembangunan daerah jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1012)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006-2025) Lembaran daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 nomor 19);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021 Nomor 13);

9. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Seluruh Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 65).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung visi dan misi kepala daerah tahun

2021-2026

b. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2020 adlah sebagai acuan/arrah bagi Badan pendapatan Daerah dalam menyusun program/kegiatan prioritas tahun 2024 berdasarkan ketersediaan sumberdaya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat uraian tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi, program dan Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 berorientasi pada Urusan Pelayanan Dasar yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi kewenangan Daerah, sampai pada triwulan II pelaksanaan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan berjalan sebagai mestinya dengan tingkat capaian realisasi 3 program dan 23 sub kegiatan dan keuangan sebesar 44,71% dan 43,48%.

a. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

1. Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target 1 dokumen
2. Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target 1 dokumen
3. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target 26 paket
4. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan target 2 unit
5. Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan target 5 dokumen

b. Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah

c. Kebijakan/tindakan pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur dan peningkatan sosialisasi yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2026 (Akhir Periode (RENSTRA))	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun 2024	
1						2	3	4	5	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	9	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50	2 dokumen	2 Doku,em	100
5	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100

5	02	01	2	02		Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah										
5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang	31 orang	31 orang	31 orang	100	31 orang	31 orang	100	
5	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
5	02	01	5		10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 Paket	0 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	6 Paket	10 Paket	100	
5	02	01	5		10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik yang disediakan	215 Paket	37 Paket	43 Paket	10 Paket	23,26 %	0 Paket	10 Paket	100	
5	02	01	5		10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	130 Paket	26 Paket	26 Paket	0 Paket	0,00 %	0 Paket	0 Paket	100	
5	02	01	5		10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100,00 %	0 Laporan	5 Laporan	74	
5	02	01	5			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menigkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Aparatur	100 persen	50 persen	100	100	100	100	100	100	100
5	02	01	5		24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	22 Unit	23 Unit	23	23	100	22	22	100	
5	02	01	5		22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12	12	100	12	36	100	

						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100%	100	100	100	100	100	100	100
						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5	1	1	1	100	1	1	
4	01	06	1 7			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3 %	35%	100	90	90		190	100
4	01	06		17	30	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	3	1	25
4	01	06		17	31	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	2	2	33
4	01	06		17	32	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	60 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	11 Laporan	92%	500	764	25
4	01	06		17	33	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	50	125	100
4	01	06		17	34	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	25 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5	1000	67

4	01	06		17	35	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	326.170 Laporan	0 Laporan	60.329 Laporan	60.329 Laporan	100%	50060	3011350	100
4	01	06		17	36	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	25 Obyek Pajak	0 Obyek Pajak	5 Obyek Pajak	5 Obyek Pajak	100%	5 Obyek Pajak	5 Obyek Pajak	100
4	01	06		17	37	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	326.770 Dokumen	56.162 Dokumen	60.449 Dokumen	65.000 Dokumen	107%	-	-	-
4	01	06		17	38	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	600 Layanan	0 Layanan	120 Layanan	0 Layanan	0 %	1	3	100
4	01	06		17	39	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	9 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1	1	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Badan pendapatan Daerah saat ini belum memiliki indikator kinerja yang sesuai dengan NSPK dan SPM. Namun kinerja keberhasilan Badan Pendapatan Daerah dapat diukur melalui pendekatan Indikator Kinerja Utama. Indikator Badan Pendapatan Daerah adalah Persentase “Persentase Pertumbuhan PAD” sebagaimana telah tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang penetapan indikator kinerja utama(IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026.

Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi			Catatab Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase Pertumbuhan PAD	-		12,30%	1,94%	2,75%	2,86%	2,86%	-35,96%	68,84%	2,75%	2,86%	2,86%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan juga memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kabupaten Nunukan dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Pengelolaan database subyek dan objek pajak daerah belum optimal
2. Data subyek dan objek pajak daerah belum tersedia secara maksimum
3. Jumlah penerimaan pajak daerah tidak sebanding dengan wajib pajak daerah yang terdaftar

Pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan daerah diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pada masyarakat, akan terjadi peningkatan jumlah output barang dan/atau jasa yang diikuti pula meningkatnya jumlah uang yang beredar dari segi pembelanjaan yang dilakukan pemerintah daerah. Kemudian akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang mana nilai PDRB inilah yang menjadi indikator dalam pertumbuhan ekonomi. Maka proses ini juga bisa berdampak pada dukungan terhadap visi Bupati Nunukan 2021-2026 yakni Mewujudkan Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat Yang Maju Aman Adil Dan Sejahtera.

Strategi ditempuh Badan pendapatan daerah dalam menghadapi permasalahan yang ada yaitu pengembangan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Kemudian kebijakan yang ditempuh dalam pelaksanaan strategi tersebut adalah Optimalisasi sumber-sumber PAD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan tahun 2024 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2020 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan

landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2020 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas yang dapat mendukung pembangunan Kabupaten Nunukan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Nunukan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	100%	8.040.346.476	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	100%	7.220.009.887	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	17.198.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi	3 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	3 dokumen	2.018.500	

			penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Realisasi Kinerja SKPD		laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Nunukan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN kantor yang disediakan	28 Orang	6.756.737.248,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Nunukan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN kantor yang disediakan	31 Orang	6.004.784.716,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket	104.587.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket	99.540.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah paket logistik yang disediakan	43 Paket	156.774.610	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah paket logistik yang disediakan	43 Paket	153.174.644,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Nunukan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	7 Paket	219.161.325	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Nunukan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	26 Paket	221.184.650,00	
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan	Kabupaten Nunukan	Jumlah laporan penyelenggara an Rapat	5 Laporan	350.000.000	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan	Kabupaten Nunukan	Jumlah laporan penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan	Laporan	313.093.000,00	

	Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Konsultasi SKPD		Konsultasi SKPD			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Nunukan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	72.732.531	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Nunukan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 laporan	72.732.531	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	287.264.160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 laporan	251.643.216,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Nunukan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21 unit	53.339.602	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Nunukan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21 unit	59.830.561,00	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	7 unit	34.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	7 unit	23.550.000,00	
	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Kabupaten Nunukan	Persentase Pertumbuhan pajak daerah	2,38%	17.525.126.981	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Kabupaten Nunukan	Persentase Pertumbuhan pajak daerah	2,38%	2.169.287.100,00	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	2 Dokumen	100.000.000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	2 Dokumen	86.271.000,00	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	2 Laporan	100.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	2 Laporan	55.650.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2 Unit	200.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2 Unit	150.000.000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan	12 Laporan	250.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	Kabupaten Nunukan	jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan	12 Laporan	238.448.000,00	

			penyebarluasan kebijakan pajak daerah			Pajak Daerah		kebijakan pajak daerah			
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	4 Dokumen	100.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen	147.791.000,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	5 Laporan	250.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	Laporan	201.714.000,00	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	120 layanan	10.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	120 layanan	11.340.000,00	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	69011 laporan	450.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Kabupaten Nunukan	jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	7436 laporan	203.022.000,00	

			Pajak Daerah			Daerah		Pajak Daerah			
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kabupaten Nunukan	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	5 obyek pajak	275.000.009	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kabupaten Nunukan	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	obyek pajak	249.339.500,00	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	69131 dokumen	250.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	69131 dokumen	115.360.000,00	
	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	5 dokumen	298.546.200	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	5 dokumen	207.120.000,00	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	5 dokumen	19.500.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	5 dokumen	19.680.000,00	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan	22 dokumen	255.231.100	Pengendalian, Pemeriksaan dan	Kabupaten Nunukan	jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan	2 dokumen	251.422.30	

	Pengawasan Pajak Daerah		pengawasan pajak daerah			Pengawasan Pajak Daerah		pengawasan pajak daerah		0,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pajak daerah	7 Laporan	161.952.300	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Nunukan	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pajak daerah	7 Laporan	152.763.300,00	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	201.281.400	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	98.724.000,00	
	Program Pengelolaan Keuangan daerah	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase penerimaan dana transfer ke daerah	100%	320.000.000	Program Pengelolaan Keuangan daerah	Provinsi Kalimantan Utara	Persentase penerimaan dana transfer ke daerah	100%	328.216.000,00	
	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi,	1 dokumen	320.000,00	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi,	1 dokumen	328.216.000,00	

	evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya		supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya			dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya		supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya			
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Adapun Nawa Cita tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya;
2. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan;
3. Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
4. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia;
5. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional;
6. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik;
7. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa;
8. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.

Nawa Cita yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan selaku leading sector) Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan adalah: (1) Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara; (3) Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan; (6) Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional; dan (7) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor

Strategis Ekonomi Domestik. Untuk keempat Nawa Cita tersebut, Kementerian Keuangan bertindak selaku *leading sector* dalam rangka pencapaian beberapa arah kebijakan dan strategi.

Nawa Cita (7) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik :

- Penguatan Kapasitas Fiskal Negara

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kapasitas fiskal negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/ utang. Secara lebih rinci sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya penerimaan perpajakan menjadi sekitar 16 persen PDB pada tahun 2020 termasuk pajak daerah sebesar satu persen PDB melalui: (i) penguatan SDM dan kelembagaan (perpajakan dan kepabeanan), termasuk peningkatan jumlah SDM Pajak dan kepabeanan menjadi dua kali lipat pada tahun 2020 yang disertai dengan upaya peningkatan kualitasnya; (ii) ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi; (iii) peningkatan akses kepada data pihak ketiga, terutama perbankan; serta (iv) dukungan dari institusi penegak hukum guna menjamin ketaatan pembayaran pajak (tax compliance). Selain itu akan dilakukan juga peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Optimalisasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

b. Sasaran :

1. Meningkatnya Penerimaan PAD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel T-C33. Tabel ini berisi program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra perubahan Badan Pendapatan Daerah dan RPJMD Kabupaten Nunukan.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah ditahun 2025 sebanyak 3 (tiga) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan. Total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan tersebut adalah sebesar 9.717.512.987,00. Nilai total untuk setiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel T-C33 berikut.

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

{berdasarkan hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (FPD) tahun 2024}

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2025			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROVI/ APBN-DAK)	CATATAN PENTING
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI KEGIATAN		
1	2	3		4	5	6	7	8
	Urusan UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	8.040.346.476	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	5	5.000.000	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	3.000.000	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	2.000.000	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan retribusi daerah	laporan	2	50.000.000	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah	dokumen	1	25.000.000	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen	1	25.000.000	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	dokumen	24	6.756.737.248	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	28	6.756.737.248,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah	laporan	4	830.522.935	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	10	104.587.000	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik yang disediakan	paket	43	156.774.610	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	7	219.161.325	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	5	350.000.000	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	2	359.996.691	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	72.732.531	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	12	287.264.160	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik Daerah yang dipelihara	unit	28	88.089.602	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	21	53.339.602	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	7	34.750.000	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan pajak daerah	%	2,38	2.670.229.600	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

2.1	Pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah pajak daerah	Rp	17.525.126.981	2.670.229.600	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Dokumen	2	100.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Laporan	2	100.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	2	150.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	laporan	12	250.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen	4	100.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	Laporan	5	250.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	layanan	120	10.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	laporan	69011	450.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI	

							DAERAH (PAD)	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	obyek pajak	5	275.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	dokumen	69131	250.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penagihan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	dokumen	5	298.546.200	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	dokumen	5	19.500.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	dokumen	22	255.231.100	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pajak daerah	Laporan	7	161.952.300	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	200.000.000	Kab. Nunukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penerimaan dana transfer ke daerah	%	100	320.000.000	DKI Jakarta Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah koordinasi pengelolaan dana transfer ke daerah	kali	6	320.000.000	DKI Jakarta Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	dokumen	1	320.000.000	DKI Jakarta Provinsi Kalimantan Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Jumlah				11.030.576.076			

Nunukan, Maret 2024
Kepala Badan


Fitraeni, S.Sos
NIP.19731130 200112 2 002

BAB V

P E N U T U P

Renja Badan pendapatan daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Badan pendapatan daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, isi dokumen Renja ini diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan pendapatan daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2025 sesuai dengan yang dicita-citakan. Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran dalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan terhadap wajib pajak.

Nunukan 4 Juli 2024

Kepala Badan



Fitareni, S.Sos

NIP.19720109 200212 1 005

LAMPIRAN

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. NUNUKAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						9.717.512.987,00							9.748.650.671,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9.717.512.987,00							9.748.650.671,00	
	5.02	KEUANGAN						9.717.512.987,00							9.748.650.671,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	7.220.009.887,00						100 Persen	7.260.554.188,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-			2 dokumen	19.216.500,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda	-	4.721.475,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	17.198.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		2.961.475,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	2.018.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		1.760.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	-			24 dokumen	6.004.784.716,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda	-	6.121.709.077,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				31 Orang/bulan	6.004.784.716,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		6.121.709.077,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah</i>	-			4 laporan	786.992.294,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda	-	680.555.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	99.540.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		99.704.940,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				43 Paket	153.174.644,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		156.774.610,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				26 Paket	221.184.650,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		174.075.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				5 Laporan	313.093.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			2 laporan	325.635.816,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda	-	337.105.296,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	73.992.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	251.643.216,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		292.105.296,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara</i>	-			28 unit	83.380.561,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-	-	116.463.040,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				21 Unit	59.830.561,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		53.319.770,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	23.550.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		63.143.270,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penerimaan dana transfer ke daerah	100 Persen			100 Persen	328.216.000,00						100 Persen	311.638.600,00	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah koordinasi pengelolaan dana transfer ke daerah	-			6 kali	328.216.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda	-	311.638.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	328.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		311.638.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan pajak daerah	3 Persen			3 Persen	2.169.287.100,00						3 Persen	2.176.457.883,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah pajak daerah	-			1805088079 1 Rp	2.169.287.100,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda	-	2.176.457.883,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	86.271.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		83.815.964,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	147.791.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		149.020.419,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	238.448.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		193.485.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	130.642.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		134.864.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				5 Laporan	201.714.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				69011 Laporan	203.022.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		187.011.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				5 Obyek Pajak	249.339.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		246.313.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				69131 Dokumen	115.360.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		114.880.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				120 Layanan	11.340.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		9.860.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				2 Dokumen	55.650.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		56.450.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				5 Dokumen	207.120.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		208.994.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				5 Dokumen	19.680.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		18.700.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				22 Dokumen	251.422.300,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		255.231.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				7 Laporan	152.763.300,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		147.832.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah															
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	98.724.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	Bapenda		120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	J U M L A H							9.717.512.987,00							9.748.650.671,00		

Kepala Badan



Fitraeni, S.Sos
Nip.197311302001122002